

Indonesia di Era Kapitalisme Negara Baru

Oleh: Rudy C Tarumingkeng



1 Apa itu Kapitalisme Negara Baru?

Model ekonomi ketika negara bukan hanya regulator, tetapi juga investor, pemilik aset strategis, pengarah industrialisasi, dan pelaku aktif dalam pasar untuk mendorong pembangunan nasional.



Negara aktif mengarahkan pasar



BUMN sebagai instrumen strategis



Investasi negara untuk sektor prioritas



Hilirisasi dan kedaulatan ekonomi

2 Landasan Konstitusional



Pasal 33 UUD 1945

- Cabang produksi penting dikuasai negara
- SDA dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
- Demokrasi ekonomi: efisiensi + keadilan sosial

3 Pilar Utama di Indonesia



1. BUMN Strategis

Energi, perbankan, telekomunikasi, transportasi, pupuk, pangan



2. Danantara

Pengelolaan aset dan investasi strategis nasional



3. Hilirisasi

Nikel, mineral, sawit, batu bara, dan nilai tambah domestik



4. Kebijakan Industri

Manufaktur, kendaraan listrik, energi, pangan



5. Infrastruktur

Pelabuhan, jalan tol, logistik, kawasan industri, digital



6. Teknologi & AI

Data, AI, digitalisasi, efisiensi layanan publik

4 Peluang Strategis



Mempercepat industrialisasi nasional



Meningkatkan nilai tambah SDA



Memperkuat kedaulatan ekonomi



Membuka lapangan kerja baru



Menarik investasi jangka panjang

Memperluas peran Indonesia dalam rantai pasok global



5 Risiko dan Tantangan



Politisasi investasi dan BUMN



Transparansi dan akuntabilitas lemah



Beban kuasi-fiskal dan utang tersembunyi



Distorsi pasar dan persaingan tidak sehat



Ketergantungan teknologi asing

Kerusakan lingkungan dan ketimpangan wilayah



6 Kunci Tata Kelola yang Sehat



Profesionalisme manajemen



Audit dan laporan keuangan terbuka



Disiplin fiskal



Pemisahan fungsi komersial vs penugasan publik



Perlindungan persaingan sehat



Orientasi pada kesejahteraan rakyat

7

Tiga Skenario Masa Depan

A. Kapitalisme Negara Produktif



Negara kuat, transparan, efisien, dan pro-kesejahteraan

B. Kapitalisme Negara Ambigu



Sebagian berhasil, tetapi tata kelola belum konsisten

C. Kapitalisme Patronase



Kekuasaan ekonomi terkonsentrasi pada elite dan rente



KESIMPULAN

Masa depan Indonesia di era kapitalisme negara baru sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola. Negara yang kuat harus disertai transparansi, akuntabilitas, inovasi, keberlanjutan, dan keberpihakan pada kemakmuran rakyat.



Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Dekan Fak. Kehutanan IPB University. 1967-1968, 1968-1971, 1977-1978

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua, Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua, Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudict75@gmail.com

24 Juni 2026

INDONESIA DI ERA KAPITALISME NEGARA BARU

Sebuah Analisis Ekonomi-Politik tentang Negara, Pasar, BUMN, Danantara, Hilirisasi, dan Masa Depan Kesejahteraan Nasional

Abstrak

Artikel ini membahas kemunculan “kapitalisme negara baru” di Indonesia sebagai bentuk terbaru dari relasi negara, pasar, modal, sumber daya alam, dan agenda pembangunan nasional. Kapitalisme negara baru tidak identik dengan sosialisme negara, nasionalisasi total, atau ekonomi komando klasik. Ia merupakan konfigurasi hibrida ketika negara bertindak sebagai regulator, pemilik modal, pengarah industrialisasi, pengelola aset strategis, pelindung kepentingan nasional, sekaligus peserta aktif dalam pasar domestik dan global. Dalam konteks Indonesia, dasar normatifnya dapat ditelusuri pada Pasal 33 UUD 1945, terutama gagasan bahwa cabang produksi penting dan sumber daya alam harus berada dalam penguasaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mahkamah Konstitusi menafsirkan “penguasaan negara” secara luas, mencakup kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan, bukan semata-mata kepemilikan langsung oleh negara. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

Secara kontemporer, kapitalisme negara baru di Indonesia tampak pada konsolidasi BUMN, hilirisasi sumber daya alam, penguatan kebijakan industri, penggunaan instrumen investasi negara, dan pembentukan

Danantara sebagai badan pengelola investasi strategis. Danantara secara resmi menyatakan mandatnya untuk mengelola dan mengoptimalkan investasi serta aset BUMN guna mendukung Asta Cita, rencana strategis nasional, industrialisasi, dan pertumbuhan ekonomi. ([Danantara Indonesia](#)) Namun, model ini mengandung dilema besar: di satu sisi dapat mempercepat transformasi industri, memperkuat kedaulatan ekonomi, dan membiayai agenda pembangunan; di sisi lain berisiko menimbulkan politisasi investasi, beban kuasi-fiskal, distorsi pasar, lemahnya transparansi, dan penurunan kepercayaan investor. Reuters melaporkan bahwa perluasan mandat Danantara ke berbagai agenda strategis memunculkan pertanyaan mengenai kapasitas pelaksanaan, independensi politik, dan transparansi laporan keuangan. ([Reuters](#))

Artikel ini berargumen bahwa masa depan kapitalisme negara baru Indonesia sangat bergantung pada kualitas tata kelola. Negara boleh dan bahkan perlu hadir secara strategis, tetapi kehadiran itu harus dibatasi oleh akuntabilitas, disiplin fiskal, transparansi, profesionalisme BUMN, perlindungan persaingan sehat, dan orientasi kesejahteraan publik. Tanpa itu, kapitalisme negara baru dapat berubah menjadi kapitalisme patronase. Dengan tata kelola yang kuat, ia dapat menjadi developmental capitalism yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata kunci: kapitalisme negara baru, Indonesia, Danantara, BUMN, Pasal 33 UUD 1945, hilirisasi, industrialisasi, tata kelola, ekonomi-politik, kesejahteraan publik.

1. Pendahuluan

Indonesia memasuki fase baru dalam sejarah pembangunan ekonominya. Setelah beberapa dekade bergerak dalam ketegangan antara liberalisasi pasar, reformasi kelembagaan, desentralisasi, globalisasi, dan penguatan

kembali peran negara, kini muncul pola yang semakin menonjol: negara tidak lagi sekadar membuat regulasi, tetapi juga mengonsolidasikan aset, mengarahkan investasi, mengendalikan komoditas strategis, memperkuat BUMN, membangun badan investasi negara, dan menggunakan instrumen publik untuk mempercepat industrialisasi. Pola inilah yang dalam literatur kontemporer sering disebut sebagai **kapitalisme negara baru**.

Kapitalisme negara baru berbeda dari kapitalisme negara klasik. Dalam kapitalisme negara klasik, negara sering dipahami sebagai pemilik langsung alat produksi, pengendali harga, pengatur alokasi sumber daya, dan aktor dominan yang menggantikan mekanisme pasar. Dalam kapitalisme negara baru, negara tetap bekerja di dalam sistem pasar global, tetapi menggunakan perangkat negara untuk mengarahkan pasar, memobilisasi modal, membentuk sektor unggulan, mengamankan sumber daya strategis, dan memperkuat daya tawar nasional. Negara tidak menolak pasar, melainkan berusaha mendesain pasar agar sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.

Dalam literatur ekonomi-politik mutakhir, kapitalisme negara baru dipahami sebagai perluasan peran negara sebagai pemilik, pengawas, promotor, dan pengarah modal di tengah perubahan struktur kapitalisme global. Alami dan Dixon menekankan bahwa kapitalisme negara kontemporer tidak boleh dipahami secara sederhana sebagai lawan dari pasar bebas, melainkan sebagai transformasi peran negara dalam kapitalisme global, termasuk melalui dana kekayaan negara, bank pembangunan, BUMN, kebijakan industri, nasionalisme ekonomi, dan strategi spasial pembangunan. ([Sage Journals](#))

Indonesia menjadi contoh menarik karena memiliki dasar konstitusional yang khas. Pasal 33 UUD 1945 menempatkan ekonomi nasional dalam kerangka usaha bersama, asas kekeluargaan, penguasaan negara atas cabang produksi penting, dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah juga menegaskan bahwa Pasal 33 harus menjadi pedoman utama pembangunan ekonomi nasional. ([Sekretariat Kabinet Republik Indonesia](#)) Dengan demikian, peran negara dalam

ekonomi Indonesia bukan sekadar pilihan teknokratis, melainkan bagian dari mandat konstitusional.

Namun, mandat konstitusional tidak otomatis menjamin hasil pembangunan yang adil. Negara dapat menjadi instrumen kesejahteraan, tetapi juga dapat menjadi instrumen rente. Negara dapat memperbaiki kegagalan pasar, tetapi juga dapat menciptakan kegagalan negara. Negara dapat mempercepat industrialisasi, tetapi juga dapat menghambat inovasi swasta. Negara dapat memperkuat kedaulatan ekonomi, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan investor bila kebijakan berubah-ubah, kurang transparan, atau terlalu politis.

Karena itu, pertanyaan utama artikel ini bukan hanya “apakah negara perlu hadir?”, melainkan **bagaimana negara harus hadir**. Apakah kehadiran negara menghasilkan nilai tambah, produktivitas, pemerataan, dan kesejahteraan? Ataukah ia hanya memperbesar konsentrasi kekuasaan ekonomi dalam lingkaran elite politik-bisnis? Apakah Danantara dan BUMN menjadi instrumen pembangunan produktif, atau menjadi kendaraan kuasi-fiskal yang membebani negara? Apakah hilirisasi sumber daya alam menciptakan industri nasional yang kuat, atau hanya memindahkan rente dari ekspor bahan mentah ke industri pengolahan yang tetap lemah secara teknologi?

2. Makna Kapitalisme Negara Baru

Secara konseptual, kapitalisme negara baru dapat dipahami sebagai konfigurasi ekonomi-politik ketika negara menggunakan kepemilikan, regulasi, investasi, insentif, proteksi, pembiayaan, dan koordinasi institusional untuk membentuk arah akumulasi kapital. Negara tidak lagi hanya menjadi “penjaga malam” yang menjamin hak milik dan kontrak, tetapi menjadi arsitek pembangunan, pemodal strategis, pengarah sektor prioritas, dan kadang-kadang pelaku pasar.

Dalam kapitalisme negara baru, terdapat beberapa ciri utama.

Pertama, negara memperkuat kendali atas sektor strategis. Sektor seperti energi, pangan, mineral kritis, infrastruktur, perbankan, telekomunikasi, transportasi, dan pertahanan dianggap terlalu penting untuk sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Dalam konteks Indonesia, ini sejalan dengan tafsir luas Pasal 33 UUD 1945, yang tidak hanya membolehkan kepemilikan negara, tetapi juga mencakup pengaturan, pengawasan, pengelolaan, dan kendali negara atas sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak. ([Mahkamah Konstitusi RI](#))

Kedua, negara menggunakan BUMN sebagai instrumen pembangunan. BUMN tidak hanya diminta mencari keuntungan, tetapi juga menjalankan penugasan publik, memperluas layanan, membangun infrastruktur, menjaga stabilitas harga, dan mendukung agenda strategis pemerintah. Di sinilah muncul dilema klasik: BUMN harus efisien seperti korporasi, tetapi juga menjalankan fungsi sosial dan strategis seperti lembaga publik.

Ketiga, negara membentuk badan investasi atau dana kekayaan negara. Danantara berada dalam kategori ini. Secara resmi, Danantara menyatakan diri sebagai badan pengelola investasi yang mengoptimalkan aset strategis dan menyediakan platform bagi investor global untuk mengakses potensi ekonomi Indonesia. ([Danantara Indonesia](#)) Model seperti ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya mengatur investasi, tetapi juga menjadi manajer portofolio dan pengarah akumulasi modal.

Keempat, kapitalisme negara baru menggunakan kebijakan industri. Hilirisasi nikel, pengembangan ekosistem kendaraan listrik, energi terbarukan, pangan, dan infrastruktur digital adalah contoh bagaimana negara mencoba mendorong transformasi struktur ekonomi dari ekspor komoditas mentah menuju produksi bernilai tambah. Studi tentang hilirisasi nikel Indonesia menempatkannya sebagai bentuk baru developmental state yang berupaya membangun industri kendaraan listrik di kawasan ASEAN. ([Universitas Indonesia](#))

Kelima, kapitalisme negara baru muncul dalam konteks geopolitik global. Fragmentasi rantai pasok, persaingan Amerika Serikat–Tiongkok, kebutuhan mineral kritis, transisi energi, dan proteksionisme baru

mendorong banyak negara memperkuat peran negara dalam ekonomi. Dengan demikian, Indonesia bukan kasus tunggal. Ia bagian dari tren global ketika negara-negara kembali menggunakan kebijakan industri, proteksi selektif, subsidi, dan investasi publik untuk mempertahankan daya saing.

3. Landasan Konstitusional: Pasal 33 dan Demokrasi Ekonomi

Indonesia memiliki basis normatif yang berbeda dari kapitalisme liberal klasik. Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, cabang-cabang produksi penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara, serta bumi, air, dan kekayaan alam digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah menyatakan bahwa UUD 1945 dan amandemennya masih berlaku sebagai dasar ketatanegaraan Indonesia. ([Database Peraturan | JDIH BPK](#))

Pasal 33 bukan sekadar pasal ekonomi. Ia adalah dasar filosofis bagi demokrasi ekonomi Indonesia. Di dalamnya terdapat gagasan bahwa ekonomi tidak boleh hanya menjadi arena akumulasi keuntungan individu, tetapi harus diarahkan pada kemakmuran bersama. Dengan kata lain, pasar perlu dikendalikan oleh nilai keadilan sosial.

Namun, tafsir Pasal 33 tidak sederhana. Apakah "dikuasai oleh negara" berarti negara harus memiliki secara langsung semua sektor strategis? Ataukah cukup melalui regulasi dan pengawasan? Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa penguasaan negara harus dimaknai luas sebagai konsep hukum publik yang mencakup kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. ([Mahkamah Konstitusi RI](#)) Tafsir ini penting karena membuka ruang bagi kombinasi antara negara, BUMN, swasta, koperasi, dan masyarakat, selama negara tetap memegang kendali strategis.

Dengan demikian, kapitalisme negara baru Indonesia seharusnya tidak dipahami sebagai penolakan terhadap swasta. Pasal 33 tidak harus

dimaknai sebagai anti-pasar. Ia lebih tepat dipahami sebagai mandat agar pasar ditempatkan dalam kerangka kepentingan publik. Negara boleh bekerja sama dengan swasta, baik domestik maupun asing, tetapi tidak boleh menyerahkan sepenuhnya sektor strategis kepada logika keuntungan privat tanpa kendali publik.

Di sinilah muncul konsep **ekonomi konstitusional**. Kebijakan ekonomi tidak hanya dinilai dari efisiensi, pertumbuhan, atau investasi, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan mandat konstitusi: apakah meningkatkan kemakmuran rakyat? apakah memperluas akses? apakah menjaga kedaulatan sumber daya? apakah mencegah monopoli privat yang merugikan masyarakat? apakah memastikan generasi mendatang memperoleh manfaat dari kekayaan alam?

Kapitalisme negara baru yang sehat harus berakar pada ekonomi konstitusional. Negara bukan pemilik absolut yang bebas bertindak tanpa pengawasan; negara adalah pemegang amanat rakyat. BUMN bukan kerajaan bisnis birokrasi; BUMN adalah instrumen fiduciary publik. Danantara bukan sekadar fund manager; ia harus menjadi pengelola aset publik yang tunduk pada akuntabilitas demokratis.

4. Genealogi Kapitalisme Negara di Indonesia

Kapitalisme negara di Indonesia tidak muncul tiba-tiba. Ia memiliki sejarah panjang.

Pada masa kolonial, ekonomi Hindia Belanda dibangun di atas ekstraksi sumber daya alam, perkebunan, perdagangan ekspor, dan infrastruktur yang melayani kepentingan kolonial. Negara kolonial berperan kuat, tetapi bukan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Ia hadir sebagai alat akumulasi kolonial.

Setelah kemerdekaan, para pendiri bangsa ingin membalik logika itu. Negara merdeka harus menguasai sumber daya strategis untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk kepentingan kolonial atau oligarki. Dari

sinilah muncul gagasan demokrasi ekonomi. Nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, pembentukan BUMN, dan peran negara dalam pembangunan merupakan bagian dari usaha membangun kedaulatan ekonomi.

Pada masa Orde Baru, negara mengambil peran besar dalam pembangunan, tetapi dengan model teknokratis-otoritarian. Negara mengendalikan pembangunan melalui perencanaan, BUMN, perbankan, subsidi, proyek infrastruktur, dan hubungan erat antara birokrasi, militer, konglomerat, dan modal asing. Hasilnya ambivalen. Di satu sisi, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, swasembada pangan pada periode tertentu, dan perluasan pendidikan. Di sisi lain, muncul korupsi, kolusi, nepotisme, monopoli, ketimpangan, dan ketergantungan pada jaringan rente.

Reformasi 1998 membawa kritik besar terhadap negara yang terlalu dominan dan koruptif. Liberalisasi, desentralisasi, privatisasi selektif, transparansi fiskal, dan penguatan lembaga demokrasi menjadi agenda penting. Namun, Reformasi tidak menghapus peran negara. BUMN tetap besar, sumber daya alam tetap strategis, dan kebutuhan infrastruktur tetap menuntut intervensi negara.

Pada era Presiden Joko Widodo, negara kembali menguat sebagai penggerak infrastruktur, hilirisasi, dan investasi strategis. Pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, bendungan, kawasan industri, dan proyek IKN menunjukkan aktivisme negara. Hilirisasi nikel menjadi simbol kebijakan industri baru. Indonesia tidak ingin hanya menjadi eksportir bahan mentah, tetapi ingin menjadi bagian dari rantai nilai baterai dan kendaraan listrik.

Pada era Presiden Prabowo Subianto, kecenderungan ini tampak semakin eksplisit. Pemerintah menegaskan kembali Pasal 33, memperluas peran Danantara, memperkuat agenda kedaulatan pangan dan energi, serta mengarahkan BUMN dan badan investasi negara untuk mendukung target pertumbuhan tinggi. Reuters melaporkan bahwa pemerintah merencanakan kontrol lebih kuat atas ekspor komoditas strategis,

termasuk batu bara, sawit, dan ferroalloy, dengan pengawasan melalui Danantara. ([Reuters](#))

Dengan demikian, Indonesia bergerak dari developmental state klasik menuju kapitalisme negara baru yang lebih kompleks: konstitusional, nasionalistik, berbasis BUMN, terbuka terhadap investor global, tetapi juga semakin aktif mengarahkan pasar.

5. Danantara sebagai Simbol Kapitalisme Negara Baru

Pembentukan Danantara merupakan salah satu tanda paling jelas dari kapitalisme negara baru Indonesia. Danantara bukan sekadar lembaga investasi biasa. Ia dirancang sebagai badan pengelola investasi strategis yang mengelola aset negara, mengoptimalkan BUMN, menarik investasi global, dan mendukung agenda transformasi ekonomi nasional. Situs resmi Danantara menyatakan bahwa lembaga ini didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 dan memiliki mandat untuk mengelola serta mengoptimalkan investasi pemerintah dan aset BUMN guna mendukung Asta Cita, rencana strategis nasional, industrialisasi, dan pertumbuhan ekonomi. ([Danantara Indonesia](#))

Secara ideal, Danantara dapat menjalankan tiga fungsi besar.

Pertama, fungsi konsolidasi aset. BUMN Indonesia tersebar dalam banyak sektor dan entitas. Konsolidasi dapat mengurangi duplikasi, meningkatkan efisiensi, memperkuat neraca, dan menciptakan sinergi. Reuters melaporkan bahwa Presiden Prabowo pernah menyatakan rencana memangkas jumlah perusahaan negara dari sekitar 1.000 menjadi sekitar 200 melalui Danantara. ([Reuters](#)) Bila dilakukan dengan prinsip profesional, konsolidasi dapat memperbaiki kinerja BUMN.

Kedua, fungsi investasi strategis. Danantara dapat menggunakan dividen, aset, dan leverage untuk membiayai sektor prioritas seperti hilirisasi mineral, energi terbarukan, pangan, kecerdasan buatan, infrastruktur, dan industri manufaktur. Reuters melaporkan bahwa Danantara sejak awal

dimaksudkan sebagai lembaga seperti Temasek, dengan modal awal sedikitnya Rp1.000 triliun dan pengambilalihan kepemilikan pemerintah di perusahaan-perusahaan negara besar. ([Reuters](#))

Ketiga, fungsi koordinasi pembangunan. Negara sering menghadapi masalah koordinasi: kementerian berjalan sendiri-sendiri, BUMN mengejar target sektoral, pemerintah daerah memiliki kepentingan lokal, dan swasta menunggu kepastian kebijakan. Danantara berpotensi menjadi platform koordinasi investasi lintas sektor.

Namun, potensi ini datang bersama risiko besar. Semakin luas mandat Danantara, semakin besar tuntutan tata kelolanya. Reuters melaporkan bahwa sebagian analis menilai mandat Danantara telah meluas melampaui sovereign wealth fund, development bank, dan public service provider sekaligus; laporan yang sama juga menyoroti kekhawatiran mengenai ketiadaan laporan keuangan publik pada saat itu dan kebutuhan pemisahan jelas antara fungsi komersial dan tugas kebijakan. ([Reuters](#))

Di sinilah persoalan mendasar muncul: apakah Danantara akan menjadi Temasek versi Indonesia, atau menjadi "superbody" politik-ekonomi yang terlalu luas mandatnya? Temasek berhasil karena disiplin komersial, tata kelola profesional, transparansi, pemisahan politik dan investasi, serta akuntabilitas. Bila Indonesia mengambil bentuk kelembagaannya tetapi mengabaikan prinsip tata kelolanya, hasilnya dapat menyimpang.

Danantara harus menjawab beberapa pertanyaan kunci: siapa yang mengawasi? bagaimana keputusan investasi dibuat? apakah proyek dengan return rendah dapat dipisahkan dari portofolio komersial? bagaimana risiko fiskal dicatat? bagaimana konflik kepentingan dicegah? bagaimana DPR, BPK, OJK, publik, dan investor memperoleh informasi? bagaimana manajemen dipilih? bagaimana kinerja diukur: dividen, return, penciptaan nilai, lapangan kerja, atau dampak sosial?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan menentukan apakah Danantara menjadi instrumen pembangunan yang kredibel atau sumber risiko sistemik.

6. Hilirisasi dan Kebijakan Industri

Hilirisasi merupakan salah satu wajah utama kapitalisme negara baru Indonesia. Kebijakan ini bertolak dari kritik lama terhadap struktur ekonomi berbasis ekspor bahan mentah. Selama terlalu lama, Indonesia menjual komoditas primer dengan nilai tambah rendah, sementara negara lain memperoleh keuntungan lebih besar dari pengolahan, teknologi, manufaktur, dan branding.

Hilirisasi nikel menjadi contoh paling menonjol. Indonesia memiliki cadangan nikel besar dan memanfaatkannya untuk membangun industri pengolahan, stainless steel, baterai, dan kendaraan listrik. Studi Lahadalia, Wijaya, Dartanto, dan Subroto menilai hilirisasi nikel Indonesia sebagai upaya membangun model developmental state yang mempertemukan kebijakan industri, nilai tambah, dan agenda keberlanjutan. DOI studi tersebut tercatat sebagai 10.21512/jas.v12i1.11128.

Secara ekonomi, hilirisasi memiliki beberapa manfaat potensial. Ia meningkatkan nilai ekspor, menciptakan lapangan kerja industri, menarik investasi asing langsung, memperkuat basis manufaktur, memperdalam rantai pasok domestik, dan meningkatkan penerimaan negara. Secara strategis, hilirisasi membuat Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi juga pemain dalam industri masa depan seperti baterai dan kendaraan listrik.

Namun, hilirisasi juga mengandung risiko. Pertama, risiko lingkungan. Industri mineral dan smelter dapat meningkatkan tekanan terhadap air, hutan, pesisir, emisi karbon, dan masyarakat lokal bila tidak dikelola dengan standar ESG yang kuat. Kedua, risiko ketergantungan teknologi. Bila teknologi, manajemen, dan pembiayaan tetap dikuasai investor asing, Indonesia hanya berpindah dari eksportir bahan mentah menjadi tuan rumah pengolahan yang belum mandiri. Ketiga, risiko nilai tambah dangkal. Hilirisasi sejati bukan hanya membangun smelter, tetapi

membangun ekosistem teknologi, riset, pemasok lokal, SDM, manufaktur lanjutan, dan inovasi.

Keempat, risiko diplomasi dagang. Larangan ekspor dan intervensi komoditas dapat dipersoalkan dalam sistem perdagangan global. Indonesia harus mampu menyeimbangkan hak pembangunan nasional dengan komitmen internasional.

Kelima, risiko ketimpangan wilayah. Kawasan industri mineral dapat tumbuh cepat, tetapi masyarakat lokal belum tentu menikmati manfaat secara adil. Bila pekerja terampil berasal dari luar daerah, tanah lokal terkonversi, lingkungan rusak, dan pendapatan mengalir ke pusat, maka hilirisasi dapat menimbulkan konflik sosial.

Karena itu, hilirisasi perlu dipahami bukan sebagai slogan, tetapi sebagai strategi industrialisasi terpadu. Ia memerlukan peta jalan teknologi, kebijakan pendidikan vokasi, riset material, energi bersih, logistik efisien, pembiayaan jangka panjang, perlindungan lingkungan, dan tata kelola daerah.

7. Kapitalisme Negara Baru dan Disiplin Fiskal

Salah satu tantangan terbesar kapitalisme negara baru adalah hubungan antara ambisi pembangunan dan disiplin fiskal. Negara yang aktif membutuhkan biaya besar. Infrastruktur, pangan, energi, hilirisasi, subsidi, program sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan investasi strategis semuanya menuntut pembiayaan.

OECD memperkirakan defisit anggaran Indonesia melebar dari 2,9% PDB pada 2025 menjadi 3,0% pada 2026, sementara tekanan harga minyak dapat meningkatkan beban subsidi bahan bakar. OECD juga mencatat bahwa belanja modal di luar anggaran melalui Danantara diperkirakan mendukung investasi dan memperkuat sikap fiskal yang secara keseluruhan suportif. ([OECD](#))

Di sinilah muncul risiko kuasi-fiskal. Bila proyek pemerintah tidak sepenuhnya dibiayai APBN, tetapi dipindahkan ke BUMN, bank negara, atau badan investasi, maka beban fiskal dapat menjadi kurang terlihat. Secara akuntansi, defisit APBN mungkin tetap terkendali, tetapi risiko berpindah ke neraca BUMN atau lembaga investasi negara. Jika proyek gagal, utang tetap harus ditanggung secara langsung atau tidak langsung oleh negara.

World Bank memperkirakan pertumbuhan Indonesia melambat menjadi 5% pada 2026 karena tekanan fiskal dari belanja ambisius dan kenaikan biaya subsidi energi. Laporan Reuters tentang penilaian World Bank juga menyoroti kekhawatiran terhadap arus keluar modal, pelemahan rupiah, dan tekanan pasar akibat rencana belanja besar pemerintah. ([Reuters](#))

Masalahnya bukan pada belanja negara itu sendiri. Belanja negara dapat menjadi produktif bila diarahkan pada infrastruktur, pendidikan, kesehatan, riset, teknologi, dan transformasi industri. Masalah muncul ketika belanja bersifat konsumtif, kurang tepat sasaran, tidak transparan, atau tidak menghasilkan peningkatan produktivitas jangka panjang.

Kapitalisme negara baru membutuhkan **fiscal realism**. Negara boleh ambisius, tetapi harus realistis terhadap kapasitas penerimaan pajak, biaya utang, stabilitas rupiah, ruang fiskal, dan kredibilitas kebijakan. Pertumbuhan 8% tidak dapat dicapai hanya dengan ekspansi belanja; ia memerlukan produktivitas, investasi berkualitas, kepastian hukum, kualitas SDM, efisiensi logistik, inovasi, dan stabilitas makroekonomi.

8. Pasar Modal, Investor, dan Kepercayaan

Kapitalisme negara baru tidak bisa mengabaikan kepercayaan pasar. Indonesia membutuhkan investasi domestik dan asing untuk membiayai pembangunan. Bahkan ketika negara memperkuat perannya, modal swasta tetap penting. BUMN dan Danantara tidak mungkin membiayai semua kebutuhan investasi nasional sendirian.

Di sinilah kepercayaan menjadi modal institusional. Investor tidak hanya melihat potensi pasar, sumber daya alam, dan pertumbuhan penduduk. Mereka juga melihat transparansi, konsistensi kebijakan, independensi lembaga, perlindungan hukum, likuiditas pasar modal, tata kelola perusahaan, dan risiko intervensi politik.

Reuters melaporkan bahwa MSCI memperpanjang peninjauan atas status pasar Indonesia dan menyoroti reformasi seperti peningkatan free float dari 7,5% menjadi 15%, penurunan ambang pengungkapan pemegang saham dari 5% menjadi 1%, serta langkah-langkah untuk memperbaiki tata kelola pasar. Namun, Reuters juga mencatat bahwa arus masuk asing tetap penting bagi target pertumbuhan dan stabilisasi mata uang Indonesia.

[\(Reuters\)](#)

Jika kapitalisme negara baru dipersepsikan sebagai nasionalisme ekonomi yang tidak transparan, investor dapat menahan diri. Jika kebijakan komoditas berubah cepat, mekanisme harga tidak jelas, BUMN diberi perlakuan istimewa berlebihan, dan lembaga investasi negara menjalankan mandat politik yang kabur, pasar akan meminta premi risiko lebih tinggi. Akibatnya biaya modal naik, rupiah tertekan, dan investasi produktif tertunda.

Namun, bila kapitalisme negara baru dikelola dengan standar tata kelola tinggi, ia justru dapat meningkatkan kepercayaan. Negara yang mampu mengonsolidasikan aset, memperjelas prioritas industri, membangun infrastruktur, mempercepat perizinan, menjaga persaingan sehat, dan menjamin akuntabilitas dapat menarik investor jangka panjang.

Dengan kata lain, isu utamanya bukan “negara atau pasar”, tetapi **kualitas institusi yang menghubungkan negara dan pasar.**

9. Risiko Oligarki dan Kapitalisme Patronase

Salah satu bahaya terbesar kapitalisme negara baru adalah berubah menjadi kapitalisme patronase. Dalam kapitalisme patronase, kedekatan

dengan kekuasaan lebih penting daripada inovasi, efisiensi, dan produktivitas. Proyek strategis diberikan kepada kelompok tertentu; regulasi dibuat untuk melindungi kepentingan elite; BUMN menjadi alat distribusi rente; dan investasi negara dipakai untuk memperkuat jaringan politik.

Indonesia memiliki pengalaman historis dengan pola semacam ini. Karena itu, kapitalisme negara baru harus dirancang dengan kesadaran terhadap risiko oligarki. Negara yang kuat tidak otomatis berarti negara yang bersih. Bahkan, semakin besar sumber daya yang dikendalikan negara, semakin besar pula godaan untuk penyalahgunaan.

Risiko oligarki muncul dalam beberapa bentuk.

Pertama, penunjukan manajemen BUMN berdasarkan loyalitas politik, bukan kompetensi profesional. Kedua, proyek negara diberikan melalui proses yang kurang kompetitif. Ketiga, BUMN dipaksa menjalankan proyek politik tanpa analisis kelayakan memadai. Keempat, badan investasi negara menjadi instrumen pembiayaan proyek-proyek yang tidak lolos disiplin APBN. Kelima, swasta yang dekat dengan kekuasaan memperoleh perlakuan istimewa.

Untuk mencegah itu, kapitalisme negara baru membutuhkan pagar kelembagaan: audit independen, keterbukaan laporan keuangan, proses tender transparan, meritokrasi manajemen, pengawasan DPR dan publik, aturan konflik kepentingan, perlindungan whistleblower, dan keterlibatan masyarakat sipil.

OECD menekankan bahwa pedoman tata kelola BUMN bertujuan membantu pembuat kebijakan memperbaiki kerangka hukum, regulasi, dan institusional bagi kepemilikan serta tata kelola BUMN, sekaligus memastikan BUMN berkontribusi pada keberlanjutan, ketahanan ekonomi, level playing field, integritas, dan standar perilaku bisnis tinggi. ([OECD](#)) Prinsip ini sangat relevan bagi Indonesia.

10. Kapitalisme Negara Baru dan UMKM

Kapitalisme negara baru tidak boleh hanya menjadi proyek BUMN besar, konglomerasi, dan industrialisasi mineral. Jika demikian, ia akan kehilangan legitimasi sosial. Indonesia adalah negara dengan basis UMKM yang sangat besar. Sebagian besar tenaga kerja berada dalam sektor informal dan usaha kecil. World Bank mencatat bahwa sebagian besar pekerja Indonesia berada di sektor informal, terutama pertanian dan jasa. ([World Bank](#))

Karena itu, keberhasilan kapitalisme negara baru harus diukur dari kemampuannya menghubungkan proyek strategis dengan ekonomi rakyat. Hilirisasi harus membuka peluang pemasok lokal. Infrastruktur harus menurunkan biaya logistik UMKM. Digitalisasi harus memperluas akses pasar bagi usaha kecil. Perbankan negara harus memperbaiki pembiayaan produktif. BUMN harus menjadi anchor buyer, bukan pesaing yang mematikan usaha kecil.

Dalam kerangka Pasal 33, asas kekeluargaan tidak boleh dipahami sebagai romantisme masa lalu, tetapi sebagai prinsip inklusi ekonomi. Ekonomi nasional harus memberi ruang bagi koperasi, UMKM, petani, nelayan, pekerja, perempuan, generasi muda, dan daerah tertinggal. Kapitalisme negara baru yang hanya memperbesar BUMN tanpa memperkuat ekonomi rakyat akan bertentangan dengan semangat demokrasi ekonomi.

11. Dimensi Digital dan AI

Kapitalisme negara baru abad ke-21 tidak hanya berkaitan dengan tambang, energi, pangan, dan infrastruktur fisik. Ia juga berkaitan dengan data, kecerdasan buatan, cloud computing, keamanan siber, semikonduktor, dan platform digital. Negara yang tidak memiliki kapasitas digital akan tertinggal dalam kompetisi global.

Reuters melaporkan bahwa Indonesia menyiapkan integrasi AI dalam beberapa program utama pemerintah, termasuk program makan bergizi, serta membahas gagasan "sovereign AI fund" yang dikelola Danantara

dalam rancangan strategi AI. ([Reuters](#)) Informasi ini menunjukkan bahwa kapitalisme negara baru Indonesia mulai memasuki ranah teknologi strategis.

Namun, ekonomi digital memiliki logika berbeda dari ekonomi komoditas. Ia menuntut talenta, riset, data governance, perlindungan privasi, infrastruktur komputasi, literasi digital, dan ekosistem inovasi. Negara dapat membangun dana AI, tetapi tanpa universitas kuat, peneliti, startup, regulasi data, dan industri pengguna, investasi AI tidak akan menghasilkan transformasi produktif.

Kapitalisme negara baru harus berhati-hati agar tidak menjadikan AI sekadar proyek simbolik. AI perlu dikaitkan dengan masalah nyata: produktivitas pertanian, efisiensi logistik, layanan kesehatan, pendidikan adaptif, mitigasi bencana, administrasi publik, energi, dan pengawasan lingkungan. Negara harus menjadi enabler, bukan monopolis inovasi.

12. Kapitalisme Negara Baru dan Kesejahteraan

Pada akhirnya, pertanyaan paling penting adalah apakah kapitalisme negara baru meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pertumbuhan ekonomi bukan tujuan akhir. Ia adalah sarana untuk memperluas kapabilitas manusia: pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, mobilitas sosial, keamanan pangan, lingkungan hidup, dan martabat.

Program sosial besar seperti makan bergizi, bantuan sosial, subsidi, pendidikan, dan kesehatan dapat menjadi bagian dari kapitalisme negara baru bila dirancang untuk meningkatkan kualitas manusia. Tetapi program sosial juga dapat menjadi beban fiskal jika tidak tepat sasaran, tidak efisien, atau digunakan untuk kepentingan politik jangka pendek.

World Bank menekankan pentingnya mengalihkan subsidi umum yang cenderung lebih banyak dinikmati rumah tangga mampu menjadi bantuan yang lebih tepat sasaran bagi kelompok rentan. ([Reuters](#)) Ini relevan bagi

Indonesia karena subsidi energi, pangan, dan program sosial harus dikaitkan dengan produktivitas dan keadilan.

Kesejahteraan dalam kapitalisme negara baru tidak boleh dipersempit menjadi konsumsi jangka pendek. Kesejahteraan sejati mencakup kemampuan rakyat untuk berpartisipasi dalam ekonomi produktif. Karena itu, negara perlu mengarahkan investasi pada pendidikan vokasi, kesehatan preventif, riset, teknologi, dan penciptaan pekerjaan bernilai tambah.

13. Skenario Masa Depan

Ada tiga skenario utama bagi Indonesia di era kapitalisme negara baru.

Skenario pertama: kapitalisme negara produktif

Dalam skenario ini, Danantara dikelola secara profesional, BUMN direformasi, hilirisasi menghasilkan nilai tambah, fiskal tetap disiplin, investor percaya, dan negara berhasil menghubungkan proyek strategis dengan ekonomi rakyat. Negara kuat, tetapi akuntabel. Pasar tetap berjalan, tetapi diarahkan. Swasta diberi ruang, tetapi dalam kerangka kepentingan nasional.

Skenario kedua: kapitalisme negara ambigu

Dalam skenario ini, beberapa proyek berhasil, tetapi tata kelola tidak konsisten. Danantara menarik investasi, tetapi mandatnya terlalu luas. BUMN membaik di beberapa sektor, tetapi tetap terbebani penugasan. Hilirisasi tumbuh, tetapi nilai tambah domestik terbatas. Investor tetap masuk, tetapi dengan kehati-hatian. Pertumbuhan stabil sekitar 5%, tetapi belum cukup menciptakan lompatan struktural.

Skenario ketiga: kapitalisme patronase

Dalam skenario ini, negara semakin dominan tetapi tidak transparan. BUMN dipolitisasi, Danantara menjadi kendaraan proyek politik, fiskal terbebani, pasar kehilangan kepercayaan, rupiah tertekan, investasi

melemah, dan ketimpangan meningkat. Negara hadir besar, tetapi bukan untuk publik; ia hadir untuk elite. Inilah skenario yang harus dihindari.

14. Agenda Kebijakan

Agar kapitalisme negara baru Indonesia menjadi produktif dan demokratis, diperlukan beberapa agenda.

Pertama, memperjelas mandat Danantara. Fungsi komersial, pembangunan, dan pelayanan publik harus dipisahkan secara institusional dan akuntansi. Proyek dengan return komersial harus dinilai berbeda dari proyek sosial. Jika ada penugasan publik, kompensasinya harus transparan.

Kedua, memperkuat tata kelola BUMN. Direksi dan komisaris harus berbasis kompetensi. BUMN harus memiliki target kinerja yang jelas, audit terbuka, dan perlindungan dari intervensi politik harian.

Ketiga, menjaga disiplin fiskal. Pemerintah harus menghindari pemindahan beban APBN ke BUMN atau Danantara tanpa transparansi. Risiko kuasi-fiskal harus dicatat dan dipublikasikan.

Keempat, menjamin persaingan sehat. BUMN tidak boleh memonopoli sektor yang dapat dikerjakan swasta secara efisien. Negara harus hadir di sektor strategis, tetapi tetap menjaga level playing field.

Kelima, menghubungkan hilirisasi dengan inovasi. Hilirisasi harus disertai transfer teknologi, riset universitas, pengembangan SDM, pemasok lokal, dan standar lingkungan.

Keenam, memperkuat legitimasi sosial. Masyarakat lokal, pekerja, UMKM, koperasi, dan pemerintah daerah harus memperoleh manfaat nyata dari proyek strategis.

Ketujuh, membangun sistem evaluasi publik. Setiap proyek strategis harus dinilai berdasarkan nilai tambah, dampak sosial, dampak lingkungan, risiko fiskal, dan kontribusi terhadap produktivitas nasional.

Kesimpulan

Indonesia berada di persimpangan penting. Kapitalisme negara baru dapat menjadi jalan menuju transformasi ekonomi, industrialisasi, kedaulatan sumber daya, dan kesejahteraan rakyat. Tetapi ia juga dapat berubah menjadi kapitalisme patronase yang memperbesar kekuasaan elite dan menurunkan kepercayaan publik.

Kuncinya bukan pada besar atau kecilnya peran negara, tetapi pada kualitas negara. Negara yang cakap, bersih, transparan, profesional, dan akuntabel dapat menggunakan BUMN, Danantara, hilirisasi, dan kebijakan industri sebagai instrumen pembangunan. Negara yang lemah tata kelolanya akan menjadikan instrumen yang sama sebagai sumber rente dan risiko.

Pasal 33 memberi mandat moral dan konstitusional: kekayaan Indonesia harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, mandat itu harus diterjemahkan dalam institusi modern: good governance, fiscal discipline, market credibility, industrial capability, technological learning, environmental responsibility, dan democratic accountability.

Dengan demikian, masa depan Indonesia di era kapitalisme negara baru akan ditentukan oleh kemampuan mengubah kekuasaan negara menjadi kapasitas publik, mengubah aset negara menjadi nilai tambah, mengubah sumber daya alam menjadi industri berkelanjutan, dan mengubah pertumbuhan ekonomi menjadi martabat manusia.

Glossarium

Kapitalisme negara baru: Bentuk kapitalisme kontemporer ketika negara berperan aktif sebagai pemilik, pengarah, investor, regulator, dan pengawas dalam ekonomi pasar.

BUMN: Badan Usaha Milik Negara; perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara.

Danantara: Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, lembaga investasi negara yang mengelola dan mengoptimalkan aset strategis serta BUMN.

Pasal 33 UUD 1945: Dasar konstitusional ekonomi Indonesia yang menekankan asas kekeluargaan, penguasaan negara atas sektor strategis, dan pemanfaatan sumber daya alam bagi kemakmuran rakyat.

Hilirisasi: Strategi meningkatkan nilai tambah sumber daya alam melalui pengolahan domestik sebelum diekspor atau digunakan dalam industri lanjutan.

Developmental state: Negara yang secara aktif mengarahkan pembangunan industri, investasi, dan transformasi ekonomi.

Kuasi-fiskal: Aktivitas pembiayaan atau beban publik yang tidak langsung tercatat sebagai belanja APBN, tetapi dapat menjadi risiko bagi negara.

Sovereign wealth fund: Dana investasi milik negara yang mengelola aset publik untuk tujuan investasi, stabilisasi, atau pembangunan.

Level playing field: Kondisi persaingan yang adil antara pelaku usaha, termasuk antara BUMN dan swasta.

Rent-seeking: Upaya memperoleh keuntungan melalui kedekatan politik, regulasi, atau privilese, bukan melalui produktivitas.

Kapitalisme patronase: Sistem ekonomi ketika akses terhadap kekuasaan politik menentukan peluang bisnis dan akumulasi modal.

Demokrasi ekonomi: Prinsip bahwa ekonomi harus diarahkan untuk kemakmuran bersama, bukan hanya keuntungan individu atau kelompok tertentu.

Free float: Saham perusahaan yang tersedia untuk diperdagangkan publik di pasar modal.

ESG: Environmental, Social, and Governance; standar keberlanjutan yang mencakup lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Industrial policy: Kebijakan pemerintah untuk mengembangkan sektor industri tertentu yang dianggap strategis.

Daftar Pustaka

(APA 7; DOI dicantumkan pada sumber yang memiliki DOI.)

Alami, I., & Dixon, A. D. (2020). The strange geographies of the “new” state capitalism. *Political Geography*, 82, 102237.

doi:10.1016/j.polgeo.2020.102237

Alami, I., Dixon, A. D., & Mawdsley, E. (2021). State capitalism and the new global D/development regime. *Antipode*, 53(5), 1294–1318.

doi:10.1111/anti.12725

Alami, I., & Dixon, A. D. (2023). Uneven and combined state capitalism. *Environment and Planning A: Economy and Space*, 55(1), 72–99.

doi:10.1177/0308518X211037688

Alami, I., Dixon, A. D., Gonzalez-Vicente, R., Babic, M., Lee, S.-O., Medby, I. A., & de Graaff, N. (2022). Special issue introduction: What is the new state capitalism? *Contemporary Politics*, 28(3), 245–263.

doi:10.1080/13569775.2021.2022336

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (1945/updated). *Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Amandemen*. DOI tidak tersedia.

Danantara Indonesia. (2026). *About Danantara Indonesia*. DOI tidak tersedia.

Kim, K. (2021). Indonesia’s restrained state capitalism: Development and policy challenges. *Journal of Contemporary Asia*, 51(3), 419–446.

doi:10.1080/00472336.2019.1675084

Lahadalia, B., Wijaya, C., Dartanto, T., & Subroto, A. (2024). Nickel downstreaming in Indonesia: Reinventing sustainable industrial policy and developmental state in building the EV industry in ASEAN. *Journal of ASEAN Studies*, 12(1), 79–106. doi:10.21512/jas.v12i1.11128

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). *Konsep penguasaan negara dalam Pasal 33 UUD 1945 harus dimaknai secara luas*. DOI tidak tersedia.

Musacchio, A., Lazzarini, S. G., & Aguilera, R. V. (2015). New varieties of state capitalism: Strategic and governance implications. *Academy of Management Perspectives*, 29(1), 115–131. doi:10.5465/amp.2013.0094

OECD. (2024). *OECD guidelines on corporate governance of state-owned enterprises 2024*. OECD Publishing. DOI tidak tersedia.

OECD. (2026). *Indonesia: OECD economic outlook, volume 2026 issue 1*. OECD Publishing. DOI tidak tersedia.

Reuters. (2025). *Indonesia parliament to vote on new Temasek-like investment arm*. DOI tidak tersedia.

Reuters. (2025). *Indonesia to cut number of state-owned firms from about 1,000 to 200, president says*. DOI tidak tersedia.

Reuters. (2026). *Indonesia's Prabowo taps Danantara to drive agenda, testing fund's capacity*. DOI tidak tersedia.

Reuters. (2026). *Indonesia unveils ambitious targets, tightens commodities grip in pursuit of "magnificent prosperity"*. DOI tidak tersedia.

Reuters. (2026). *World Bank says Indonesia's GDP to slow to 5% in 2026 as fiscal pressures rise*. DOI tidak tersedia.

World Bank. (2026). *Indonesia economic prospects*. DOI tidak tersedia.

Copilot for this article: ChatGPT, Access date: 25 June 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#)). <https://chatgpt.com/c/6a3cfdaa-6f30-83ec-b9bf-4f7011c76d65>